

**MODEL ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA UNIVERSITAS
SRIWIJAYA (SITARI) BERBASIS SISTEM
ORGANISASI PUBLIK UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ASET**

DISERTASI



INAYATI MANDAYUNI

07013682025006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

Judul Disertasi : Model Adopsi Teknologi Informasi Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI) Berbasis Sistem Organisasi Publik Untuk Mencapai Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Aset

Nama Mahasiswa : **INAYATI MANDAYUNI**

NIM : **07013682025006**

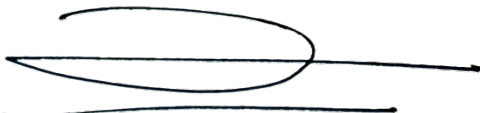
Program Studi : Doktor Administrasi Publik

Menyetujui :

Promotor

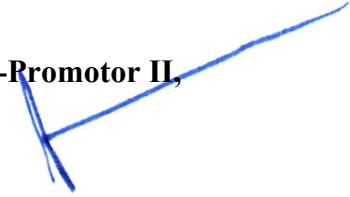
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Co-Promotor I,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

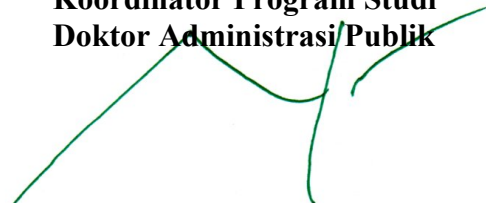
Co-Promotor II,



Dr. Andries Lionardo, M.Si
NIP. 19790501 200212 1 005

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi/Publik**



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 19631106 199003 1 001



**Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Disertasi : Model Adopsi Teknologi Informasi Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI) Berbasis Sistem Organisasi Publik Untuk Mencapai Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Aset

Nama : **INAYATI MANDAYUNI**

Nim : **07013682025006**

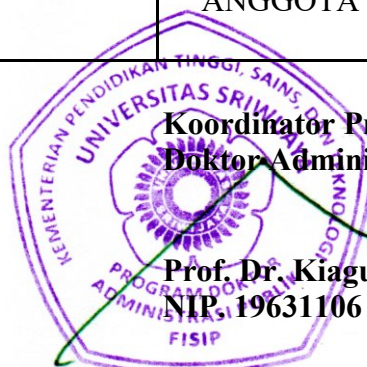
Program Studi : Doktor Administrasi Publik

Tanggal Ujian : 11 JANUARI 2025

NO	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. KIAGUS MUHAMMAD SOBRI, M.Si.	KETUA	1
2	Prof. Dr. Alfitri, M.Si.	SEKRETARIS	2
3	Dr. Andries Lionardo, M.Si	ANGGOTA	3
4	Prof. Dr. H. Entang Adhy Muhtar, M.S.	ANGGOTA	4
5	Prof. Dr. Sriati, M.S.	ANGGOTA	5
6	Dr. Ir. Abdul Najib, M.M	ANGGOTA	6
7	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	ANGGOTA	7
8	Dr. Alamsyah, M.Si	ANGGOTA	8

Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 19631106 199003 1 001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul “**Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI) Berbasis Sistem Organisasi Publik untuk Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Aset**”. Disertasi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan menempuh derajat pendidikan Strata Tiga (S-3) Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Disertasi ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah membantu, antara lain:

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., MKU., ASEAN Eng., APEC Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2016-2023
3. Para Wakil Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Co - Promotor I Disertasi yang telah memberikan banyak waktu dalam memberikan arahan, dukungan, ilmu pengetahuan, masukan, serta saran dalam proses penyusunan Disertasi ini.
5. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktorat Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya sekaligus Promotor Disertasi yang telah memberikan banyak waktu untuk memberikan arahan, dukungan, ilmu pengetahuan, masukan, serta saran dalam proses penyusunan Disertasi ini.
6. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si., selaku Co - Promotor II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberikan arahan, dukungan, ilmu pengetahuan, masukan, serta saran dalam proses penyusunan Disertasi ini.
7. Keluarga tercinta, Mama, suami, anak-anak, dan adik-adik, serta sahabat dan kerabat
8. Seluruh staf Barang Milik Negara (BMN) Universitas Sriwijaya dan staf pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya
9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Atas perhatian dan kerjasamanya, Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 13 Januari 2025

Inayati Mandayuni

ABSTRAK

SITARI dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di Universitas Sriwijaya. Namun, sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan fitur pencatatan aset tetap, kurangnya pemutakhiran data yang rinci, serta rendahnya kesadaran SDM dalam pengelolaan BMN. Untuk mendukung tertib administrasi, mempermudah pengelolaan BMN secara efisien, transparan, dan akuntabel, penelitian ini mengkaji adopsi teknologi informasi dalam konteks e-government, dengan fokus pada aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memformulasikan lima pertanyaan utama: (1) Bagaimana kapasitas sistem organisasi publik dalam adopsi teknologi informasi pada aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya? (2) Bagaimana adopsi teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi SITARI? (3) Faktor-faktor apa saja yang menentukan adopsi teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi SITARI? (4) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN berbasis sistem organisasi publik. (5) Bagaimana model adopsi teknologi informasi berbasis sistem organisasi publik dalam penggunaan aplikasi SITARI untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset?

Kelima pertanyaan tersebut akan dijawab melalui integrasi Teori Sistem Organisasi Publik (Mele et al., 2010) dan kerangka Technology Organization Environment (TOE) (Tornatzky & Fleischer, 1990), serta Konsep Transparansi (Krina, 2003) dan Akuntabilitas (Kumorotomo, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama 32 informan kunci, serta diperkaya dengan analisis dokumen dan literatur yang komprehensif. Analisis data mengadopsi pendekatan interaktif Miles dan Huberman (2014), dengan validitas penelitian diperkuat melalui pengujian kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Penelitian ini menghasilkan model adopsi teknologi informasi yang mengintegrasikan lima dimensi utama: Sumber Daya Manusia, Sistem dan Teknologi, Organisasi, Transparansi dan Akuntabilitas, dan Manajemen Pengetahuan. Model ini dapat menjadi kerangka kerja teoretis yang memperkaya pemahaman tentang e-government dalam pengelolaan aset publik, serta memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan kebijakan dan aplikasi SITARI yang berkelanjutan. Model ini juga mampu menjadi acuan bagi institusi publik lainnya dalam mengadopsi teknologi informasi secara efektif, khususnya dalam konteks pelaporan aset negara yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Adopsi Teknologi; E-Government; Barang Milik Negara, SITARI; Manajemen Pengetahuan.

ABSTRACT

SITARI is designed to enhance transparency and accountability in the reporting of State-Owned Assets (BMN) at Sriwijaya University. However, this system still faces several challenges, such as limited features for recording fixed assets, lack of detailed data updates, and low awareness of human resources in managing BMN. To support orderly administration, facilitate BMN management efficiently, transparently, and accountably, this study examines the adoption of information technology in the context of e-government, focusing on the SITARI application at Sriwijaya University. This study formulates five main questions: (1) How is the capacity of public organizational systems in the adoption of information technology in the SITARI application at Sriwijaya University? (2) How is information technology adoption in the use of the SITARI application? (3) What factors determine the adoption of information technology in the use of the SITARI application? (4) How is the transparency and accountability of BMN asset reporting based on public organizational systems? (5) What is the information technology adoption model based on public organizational systems in the use of the SITARI application to achieve transparency and accountability in asset reporting?

These five questions will be answered through the integration of the Public Organizational Systems Theory (Mele et al., 2010) and the Technology Organization Environment (TOE) framework (Tornatzky & Fleischer, 1990), as well as the concepts of Transparency (Krina, 2003) and Accountability (Kumorotomo, 2005). This study employs a qualitative descriptive approach. Primary data is obtained through in-depth interviews with 32 key informants and is enriched with comprehensive document and literature analysis. Data analysis adopts the interactive approach of Miles and Huberman (2014), with research validity reinforced through tests of credibility, transferability, dependability, and confirmability.

This study produces an information technology adoption model that integrates five main dimensions: Human Resources, Systems and Technology, Organization, Transparency and Accountability, and Knowledge Management. This model can serve as a theoretical framework that enriches the understanding of e-government in public asset management and provides practical recommendations for sustainable policy and SITARI application development. This model can also serve as a reference for other public institutions in effectively adopting information technology, particularly in the context of transparent and accountable state asset reporting.

Keywords: Technology Adoption; E-Government; State-Owned Assets; SITARI; Knowledge Management.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 E-Government: Janji dan Manfaat dalam studi terkini	1
1.1.2 Pentingnya Mempelajari Kesuksesan E-Government.....	4
1.1.3 Gap Penelitian Tentang Studi Keberhasilan E-Government.....	6
1.1.4 Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI)	7
1.1.5 Gap Penelitian Tentang SIMAK-BMN.....	11
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 New Public Management (NPM).....	33
2.3 E-Government	42
2.3.1 Konsep E-Government.....	42
2.3.2 Ragam Definisi.....	43
2.3.3 Keberhasilan E-government.....	48
2.3.4 Sejarah E-Government	51
2.3.5 Tata Kelola E-Government di Institusi Pendidikan Tinggi.....	52
2.3.6 Dampak Digitalisasi	58
2.4 Manajemen Aset.....	71
2.5 E-Government dan Pengelolaan Barang Milik Negara.....	75
2.6 Teori yang digunakan dalam Penelitian ini.....	77
2.6.1 Adopsi Teknologi. Teori The Technological, Organization, and Environment (TOE) (Tornatzky & Fleischer, 1990).....	78
2.6.2 Teori Sistem Organisasi Publik (Mele et al., 2010).....	81
2.6.3 Konsep Transparansi dan Akuntabilitas.....	85
2.7 Kerangka Konseptual Penelitian	86
BAB III METODE PENELITIAN.....	90
3.1 Jenis Penelitian.....	90
3.2 Desain Penelitian.....	91
3.3 Definisi Konsep.....	93
3.4 Fokus Penelitian	93
3.5 Lokasi Penelitian.....	97

3.6	Informan Penelitian	97
3.7	Jenis dan Sumber Data	100
3.7.1	Data Primer	100
3.7.2	Data Sekunder	101
3.8	Teknik Pengumpulan Data	101
3.8.1	Wawancara Mendalam	102
3.8.2	Observasi	102
3.8.3	Dokumentasi	103
3.9	Teknik Analisis Data	104
3.9.1	Kondensasi Data (Data Condensation)	105
3.9.2	Penyajian Data (Data Display)	106
3.9.3	Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>)	107
3.10	Teknik Pengabsahan Data	108
3.10.1	Uji Kredibilitas (Credibility)	109
3.10.2	Uji Transferabilitas (Transferability)	112
3.10.3	Uji Dependabilitas (Dependability)	112
3.10.4	Uji Konfirmabilitas (Confirmability)	113
BAB IV		114
GAMBARAN UMUM		114
4.1	Universitas Sriwijaya	114
4.1.1	Sejarah Perkembangan Universitas Sriwijaya	114
4.1.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Sriwijaya	120
4.1.3	Lambang Universitas Sriwijaya	122
4.1.4	Struktur Organisasi Universitas Sriwijaya	123
4.1.5	Transparansi, Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pengelolaan PTN ...	130
BAB V		136
HASIL DAN PEMBAHASAN		136
5.1	Penyajian Data	136
5.1.1	Kapasitas Sistem Organisasi Publik dalam Penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya	136
5.1.2	Adopsi Teknologi Informasi dalam Aplikasi SITARI	168
5.1.3	Transparansi SITARI	235
5.1.4	Akuntabilitas SITARI	240
5.2	Pembahasan	252
5.2.1	Faktor-faktor Penentu Adopsi Teknologi Informasi dalam Penggunaan SITARI di Universitas Sriwijaya	252
5.2.2	Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI) berbasis Sistem Organisasi Publik	254
5.2.3	Proposisi	263
BAB VI		271
PENUTUP		271
6.1	Kesimpulan	271
6.2	Implikasi Penelitian	274

6.2.1	Implikasi Teoritis	274
6.2.2	Implikasi Praktis.....	275
6.3	Keterbatasan Penelitian.....	276
6.4	Saran.....	277
6.4.1	Saran Teoritis	277
6.4.2	Rekomendasi Kebijakan.....	277
DAFTAR PUSTAKA		281
LAMPIRAN.....		306

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Fokus Penelitian.....	95
Tabel 3. Daftar Informan Penelitian.....	98
Tabel 4. Ringkasan Temuan Penelitian.....	245
Tabel 5. Preposisi	269

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Universitas Sriwijaya	9
Gambar 2. Perkembangan Manajemen Aset	75
Gambar 3. Model Konseptual Penelitian	87
Gambar 4. Desain Penelitian	92
Gambar 5. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (1994)	108
Gambar 6. Rangkaian Perkembangan Institusi dan Rencana Perubahan Universitas Sriwijaya Menjadi PTN-BH	117
Gambar 7. Logo Universitas Sriwijaya	122
Gambar 8. Struktur Organisasi Universitas Sriwijaya	125
Gambar 9. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021....	131
Gambar 10. Dashboard Universitas Sriwijaya	132
Gambar 11. Aplikasi Layanan Universitas Sriwijaya	133
Gambar 12. IFD Horion Interactive (TA 2021)	156
Gambar 13. Pengereng Electroda (TA 2021)	157
Gambar 14. Mesin Pemetong Rumput (TA 2020)	157
Gambar 15. Meja Rapat (TA 2020)	158
Gambar 16. Notebook (TA 2019)	158
Gambar 17. Notebook (TA 2018)	159
Gambar 18. AC Split (TA 2019)	159
Gambar 19. Dispenser (TA 2018)	160
Gambar 20. Lemari Es (TA 2017)	160
Gambar 21. Printer (TA 2016)	161
Gambar 22. Gedung dan Bangunan Fakultas Hukum (FH Tower)	161
Gambar 23. Gedung dan Bangunan Kantor Rektorat	162
Gambar 24. Gedung dan Bangunan Landmark (Kampus Indralaya)	162
Gambar 25. Gedung dan Bangunan (Kampus Palembang) Pendopo Seni Budaya, Universitas Sriwijaya	162
Gambar 26. Pengelola SITARI	171
Gambar 27. Pengelola SITARI	172
Gambar 28. Perangkat yang Digunakan dalam Pengoperasian SITARI	209
Gambar 29. Tampilan Website SITARI	211
Gambar 30. Model Existing Penelitian	251
Gambar 31. Model Rekomendasi Penelitian	257

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian.....	307
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Bersama Rektor Universitas Sriwijaya.	312
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Bersama Wakil Rektor II Universitas Sriwijaya	312
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Bersama Wakil Dekan II FKM	312
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator Tata Usaha dan Sub Koordinator BMN FISIP.....	313
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator dan Operator BMN FH.....	313
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Bersama Operator BMN FKIP	313
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator, Sub Koordinator BMN, dan Operator SIMAK FP	314
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator, Sub Koordinator, dan Operator BMN FMIPA	314
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator, Sub Koordinator, dan Operator BMN FT	314
Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator Tata Usaha Fasilkom.....	315
Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara Bersama Koordinator, Sub Koordinator, dan Para Operator BMN.....	315
Lampiran 13. Observasi BMN di Bidang BMN	315
Lampiran 14. Observasi BMN FP.....	316
Lampiran 15. Observasi BMN FMIPA.....	316
Lampiran 16. Observasi BMN FKIP	316
Lampiran 17. Observasi BMN FISIP	317
Lampiran 18. Pedoman Wawancara	318
Lampiran 19. Pedoman Observasi	323
Lampiran 20. Pedoman Dokumentasi	324
Lampiran 21. Peraturan/Undang-Undang	325

DAFTAR SINGKATAN

APBN: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BLU: Badan Layanan Umum
BMN: Barang Milik Negara
E-gov/E-government: Electronic Government
FASILKOM: Fakultas Ilmu Komputer
FH: Fakultas Hukum
FISIP: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FK: Fakultas Kedokteran
FKIP: Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FMIPA: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
FP: Fakultas Pertanian
FT: Fakultas Teknik
IS: Information System
IT: Information Technology
KPKNL: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
NPM: New Public Management
PP: Peraturan Pemerintah
PTN: Perguruan Tinggi Negeri
PTN-BH: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
SAIBA: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SDM: Sumber Daya Manusia
SERVQUAL: Service Quality
SIMAK-BMN: Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
SITARI: Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya
SPAN: Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara
TA: Tahun Anggaran
TAM: Technological Acceptance Model
TIK: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TOE: Technological Organization Environment
TQM: Total Quality Management
UNSRI: Universitas Sriwijaya
UPT: Unit Pelaksana Teknis
UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian pendahuluan berisi tentang alasan akademis dan praktis tentang kebutuhan untuk mempelajari *e-government* dalam pengelolaan barang dan jasa secara digital di institusi pendidikan tinggi. Secara lebih detail, dalam latar belakang, penulis akan memulainya dengan memberikan gambaran tentang *e-government* dan manfaatnya, kesuksesan *e-government* dan kesenjangan penelitian serta masalah-masalah empiris berkaitan dengan adopsi dan penggunaan *e-government* di di institusi pendidikan tinggi

1.1.1 E-Government: Janji dan Manfaat dalam studi terkini

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan dari para akademisi dan praktisi bahwa *e-government* telah memberikan manfaat yang besar bagi pemangku kepentingan dan oleh karena itu, memastikan manfaat-manfaat tersebut benar-benar diterima dan mendesain *e-government* sesuai dengan keinginan pengguna adalah penting untuk dilakukan (J. Davies & Procter, 2020; Guntur et al., 2018; Serrano-Cinca & Muñoz-Soro, 2019). Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai janji-janji *e-government* dalam riset-riset kontemporer.

Sebagaimana pemerintah telah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk membangun teknologi informasi dan komunikasi beserta ekosistemnya, mempelajari manfaat-manfaat yang diberikan oleh *e-governmet* adalah penting, terutama untuk mengetahui apakah dalam studi-studi terkini, investasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut apakah benar-benar membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (Imran & Gregor, 2005; Kwok, 2014; Liu & Yuan, 2015). Dalam literatur, *e-government* dimanifestasikan dalam berbagai hal seperti *website*, aplikasi berbasis *website*, aplikasi berbasis komputer, media sosial, dan aplikasi berbasis mobile (Imran & Gregor, 2019; Moreno Cegarra et al., 2014; Odendaal, 2003).

Dalam literatur, *e-government* disebut-sebut dan terbukti mampu mengurangi biaya transaksi administrasi dan operasional untuk pemerintah (Brooks & Mohammed, 2014; Mangla & Luthra, 2022; Sardjono et al., 2020). *E-government*

mampu menyelesaikan urusan-urusan publik tanpa harus masyarakat bertemu dengan pemerintah secara langsung. Masyarakat cukup mengakses sistem informasi tertentu, memilih jenis layanan, mengisi *form-form* tertentu dan mengunggah persyaratan (Glyptis et al., 2020; Goodin, 2017; Sivarajah et al., 2015). Manfaat lain adalah promosi demokrasi yang partisipatif karena *e-government* memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah yang sulit dijangkau (J.-S. Lee & Jun, 2021; Oyekunle & Akanbi-Ademolake, 2014; Panganiban, 2019; Patsioura, 2014; Pons, 2004; Veiga & Rohman, 2017). Masyarakat dapat menyampaikan, usulan, keluhan dan sarannya terhadap suatu pelayanan publik. Pemerintah, setelah itu, dapat merespon dengan memberikan serangkaian perbaikan. Hak-hak individu warga negara dibuktikan dalam literatur menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

Manfaat lain adalah efisiensi pelayanan kepada pemangku kepentingan seperti pegawai pemerintah, masyarakat dan sektor bisnis (Chomchalao & Naenna, 2013; R. Naidoo & Palk, 2010; Nasrun Mohd Nawi et al., 2016; Raman et al., 2007). Hal ini dapat didapatkan dari waktu dan biaya layanan yang dapat direduksi secara signifikan. Manfaat ini membawa pada diskusi pada manfaat selanjutnya yaitu jaminan ketepatan waktu pelayanan yang dapat didesain sedemikian hingga, memaksa karyawan pemerintah untuk berkerja dengan lebih cepat dan efisien untuk memenuhi target kinerja tertentu. Selanjutnya adalah transparansi (Mensah et al., 2020; Pedersen, 2017; Rahman, 2007; Roessobiyatno et al., 2016; Veiga & Rohman, 2017). E-government memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mendokumentasikan berbagai aktivitasnya yang sebelumnya dilakukan secara tertutup. Melalui e-government pemerintah dapat mempublikasikan berbagai macam data dan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, masyarakat yang demokratis juga membentuk hal yang sama, menginginkan keterbukaan informasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

E-government juga mendorong terciptanya layanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau disebut dengan *citizen-centric public service* (Bogdanovic-Dinic et al., 2013; Bwalya & Mutula, 2016; Glyptis et al., 2020; Oyekunle & Akanbi-Ademolake, 2014; Susanto & Goodwin, 2011). Layanan publik dengan jenis ini dapat tercipta karena komunikasi multi arah yang muncul

karena e-government. Selain itu, pandangan tentang e-government sebagai suatu produk layanan publik yang berevolusi juga mendorong terus terjadinya perubahan berbagai macam fitur yang ia berikan. Fungsi masyarakat di sini, sebagai penikmat layanan, sekaligus kelompok yang memberikan dorongan terhadap penciptaan layanan publik yang semakin sesuai dengan keinginan dan karakteristik mereka. Manfaat lain adalah terciptanya informasi yang up-to-date karena pemerintah dan masyarakat tidak lagi berjarak, yang memisahkan mereka hanyalah kecepatan internet (Banowosari et al., 2014; İskender & Özkan, 2013; Mensah et al., 2020; Nasrun Mohd Nawi et al., 2016). Pemerintah ketika ingin memberikan informasi terhadap masyarakat dapat langsung menginformasikannya. Sebelumnya proses ini memakan waktu karena menggunakan saluran informasi tradisional seperti televisi, radio, koran dan lain sebagainya.

Adopsi, adaptasi dan penggunaan e-government menawarkan manfaat yang besar bagi tata kelola organisasi dan pelayanan publik bagi berbagai macam subyek dari pelayanan publik dan oleh karena itu ada perhatian dan permintaan besar untuk membuat kerangka kerja keberhasilan e-government (Bolleyer, 2009; Bwalya & Mutula, 2016; Gunawan et al., 2020; Mensah et al., 2020; Susanto & Goodwin, 2011). Penelitian tentang manfaat e-government telah menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk jenis subyek pelayanan yang berbeda yaitu pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan sektor bisnis.

Kebanyakan dari mereka menyelidikinya di lingkungan pemerintah dari level nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (Bolleyer, 2009; Bwalya & Mutula, 2016; Chomchalao & Naenna, 2013; Gronau et al., 2017; G. Naidoo, 2008; Veiga & Rohman, 2017). E-government di universitas atau pendidikan tinggi menawarkan ruang penelitian yang besar untuk hal ini juga. Karakter organisasi pendidikan tinggi yang berbeda membuat e-government harus disusun secara berbeda pula. Perguruan tinggi merupakan organisasi tempat ilmu diproduksi dan direproduksi dengan hubungan antar entitas di dalamnya yang lebih erat karena biasanya mereka terlibat dalam hubungan yang singkat dan dalam aspek geografis yang lebih sempit.

1.1.2 Pentingnya Mempelajari Kesuksesan E-Government

Penelitian tentang evaluasi e-government telah menjadi subyek penelitian yang menarik semenjak kemunculannya. Namun berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa masalah tentang studi keberhasilan e-government. Keberhasilan e-government adalah studi yang sangat kontekstual di mana ia digunakan dan dikembangkan (Boonmee, 2017; Senjaya et al., 2020; M. J. van den Haak et al., 2009). Untuk itu, studi ini memerlukan kerangka yang berbeda dalam ruang yang berbeda. Dengan kata lain, studi keberhasilan e-government belum sepenuhnya diselidiki dari perspektif yang berbeda meskipun sejumlah literatur besar telah diterbitkan dalam ruang lingkup ini (Al-Solbi & Al-Harbi, 2008; Hanefeld et al., 2018; Purnastuti & Izzaty, 2016; Thor & Evtuhovici, 2003).

Tantangan lain adalah karena studi keberhasilan e-government merupakan jenis studi yang secara praktik maupun teoritik penting dan kompleks (Akram et al., 2019; Y.-C. Chen et al., 2019; Gisquet, 2020; Madyatmadja et al., 2018; Senjaya et al., 2020). Kompleksitas ini adalah karena studi ini mengukur berbagai perspektif yang berbeda mulai dari manfaat, konteks sosial dan teknis penggunaan dan oleh karena itu e-government bukanlah merupakan suatu produk sederhana dan memerlukan evaluasi terus menerus berkaitan dengan dinamika dari penggunaannya untuk mengarahkan pada peningkatan e-government (Christensen, 2021; Dias, 2020; Heng Wang & Jinchang Hou, 2010; Tassabehji et al., 2016).

E-government merupakan salah satu sistem informasi yang memiliki konteks khusus dengan alasan pengembangan dan tujuan penggunaan yang berbeda dalam konteks dan lingkungan yang berbeda (Manoharan & Ingrams, 2018; Purnastuti & Izzaty, 2016; Yun & Opheim, 2010). Memahami penerimaan dan penolakan suatu produk e-government telah menjadi tugas yang menantang bagi pemerintah untuk mendorong keberhasilan e-government. Tuntutan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan pelanggan juga muncul karena mereka mengakses layanan dari sektor swasta yang lebih kompetitif. Ini meninggalkan tantangan baik dari manajer organisasi publik maupun swasta untuk secara periodic mengevaluasi keberhasilan atau efektivitas investasi dalam bidang TIK (Moon et al., 2016; Ngwenya, 2013; Rahman, 2007; Yoon & Chae, 2009; Yun & Opheim, 2010).

Memahami kualitas layanan e-government dan kepuasan pengguna merupakan tugas menantang bagi pemerintah untuk dua alasan penting. Pertama pengguna e-government membutuhkan peningkatan yang signifikan karena ada ekspektasi yang tinggi melalui penyediaan layanan publik dengan sistem informasi dibandingkan dengan saluran tradisional (Lundgren & McMakin, 2009; Tassabehji et al., 2016; M. J. van den Haak et al., 2009). Kedua, pemerintah dapat mengambil manfaat dari memindahkan permintaan layanan online e-government dari saluran offline dan tradisional ke saluran online. Untuk itu, pendekatan sistematis untuk mengevaluasi kinerja dan pengelolaan e-government sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan tingkat implementasi e-government dengan lebih komprehensif (Ahmadi & Mustonen-Ollila, 2011; Madyatmadja et al., 2018; Uddin et al., 2020; Wootton et al., 2005). Salah satu fitur yang harus disediakan oleh pemerintah adalah tingkat kecanggihan di mana layanan online tersebut disediakan. Ini adalah karena menawarkan informasi online saja tidak cukup dan harus mengakomodasi berbagai macam fitur e-government. Syarat penting dari aktivitas ini adalah setelah dievaluasi perlu ada tindakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan. Selain itu, ini merupakan proses yang komprehensif karena memerlukan budaya pengukuran kinerja, dan mendidik karyawan dan pengguna tentang pengukuran kinerja (E. Haak et al., 2018; Lock et al., 2013; Ngwenya, 2013; Szmigielska-Rawska et al., 2018; Thor & Evtuhovici, 2003).

Alasan lain adalah karena investasi sumber daya keuangan yang signifikan. E-government mungkin dapat melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran namun dalam tahapan pengadaan ia juga membutuhkan sumber dana yang besar dan oleh karena itu menjadi tugas besar juga untuk memastikan bahwa investasi uang masyarakat dalam urusan ini benar-benar dapat menyelesaikan berbagai macam masalah publik (Boschi, 1999; Lock et al., 2013; Tassabehji et al., 2016; Wang & Shih, 2009). Meskipun investasi besar telah dilakukan untuk mengembangkan portal e-government ini, masih ada kekurangan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun mekanisme yang kompleks tentang bagaimana mengukur keberhasilan e-government dan bagaimana fitur sistem,

faktor risiko, dan karakteristik pengguna dapat mempengaruhi sukses e-government.

1.1.3 Gap Penelitian Tentang Studi Keberhasilan E-Government

Faktanya studi keberhasilan e-government masih dalam tahapan pengembangan dan bukan merupakan jenis studi yang matang karena e-government merupakan area yang kurang berkembang dan memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengukur keberhasilannya (E. Haak et al., 2018). Oleh karena itu, e-government memerlukan pengembangan dengan melakukan studi di berbagai area dan konteks yang berbeda untuk memahami faktor tersebut dan yang paling penting adalah untuk mengukur keberhasilan e-government (Al Nidawy et al., 2018; Mousavi et al., 2008).

Terdapat kumpulan literatur yang besar tentang e-government. Ini adalah karena e-government adalah studi multi disiplin yang setidaknya melibatkan dua disiplin ilmu yaitu sistem informasi dan administrasi publik. Sayangnya belum ada model komprehensif yang mengevaluasi e-government karena sebagian besar studi ini berfokus pada beberapa faktor pendorong e-government (C.-K. Chen et al., 2002; Madyatmadja & Kiswanto, 2019; Majeed et al., 2019; Ramtohul & Soyjaudah, 2013). Kesenjangan penelitian selanjutnya yang menarik perhatian para peneliti adalah kebutuhan untuk penelitian yang lebih empiris yang melintasi batas kontekstual yang berbeda untuk membangun kekuatan hubungan timbal balik. Kondisi batas yang berbeda termasuk jenis sistem informasi yang berbeda, perbedaan waktu, dan organisasi di mana e-government ini hidup dan dihidupi (Fauzie et al., 2016; Meijer & Bekkers, 2015; Mutula, 2005; Sodhi, 2015).

Kesenjangan penelitian yang ingin dicoba diisi dalam penelitian ini selain dalam konteks universitas adalah penggunaan teori dan model yang berbeda, pengintegrasian dengan teori lain dari berbagai macam disiplin ilmu dan subyek pengguna yang berbeda. Kerangka kerja yang ingin dibangun adalah kerangka kerja yang berbasis multidimensi dari berbagai panggilan penelitian terdahulu. Mengambil kesenjangan antar jenis perkembangan negara, penelitian ini berangkat dari studi di negara maju, dengan mengambil lokasi di negara berkembang di mana

keterbatasan finansial, politik yang cenderung tidak stabil, kasus korupsi yang masih ada mungkin akan mempengaruhi keberhasilan e-government.

1.1.4 Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara Universitas Sriwijaya (SITARI)

Institusi pendidikan tinggi, sebagaimana pemerintah, melakukan investasi besar-besaran pada e-government, mengharapkan dampak yang positif pada peningkatan kinerja, individual dan organisasi (Nandasara, 2012; Purnastuti & Izzaty, 2016). Universitas dengan e-government di satu sisi memiliki ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah. Mereka dapat memproduksi e-government sendiri, karena tersedia kumpulan orang terdidik yang menjadi konsultan-konsultan e-government bagi pemerintah baik dari sisi sistem ataupun berbagai fiturnya (Kusumastuti et al., 2020). Selain itu, e-government yang mereka buat digunakan sendiri oleh civitas akademik dalam lingkup yang lebih kecil sehingga user dan penyedia layanan e-government dapat berinteraksi dengan lebih intensif untuk menghasilkan produk e-government yang sesuai dengan ekspektasi penggunanya.

Di sisi lain, universitas menghadapi tantangan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tantangan yang ditemukan di pemerintah seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dari sisi sumber daya keuangan universitas juga memiliki keterikatan dengan pemerintah pusat karena mereka diharuskan mengelola keuangan sebagaimana pemerintah melakukannya (Ozkan & Kanat, 2011). Dengan kata lain, pendanaan menjadi tidak fleksibel sebagaimana disyaratkan oleh keberhasilan dari e-government. Dari sisi sumber daya manusia, mereka memiliki turn-over intention yang tinggi karena gaji pegawainya tidak lebih besar daripada mereka yang berkerja di perusahaan swasta yang menawarkan penghasilan yang lebih kompetitif (Kusumastuti et al., 2020; Ozkan & Kanat, 2011). Dari sisi tata kelola organisasi, universitas seringkali juga menemukan masalah dalam pergantian pemimpin yang menghasilkan perbedaan kebijakan di mana e-government yang telah dibuat juga harus diganti mengikuti pimpinan yang baru.

Universitas Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi dengan status PTN-BH di Indonesia yang juga melakukan investasi besar-besaran dalam e-government. Beberapa layanan e-government unggulan dari perguruan tinggi ini antara lain e-learning (aplikasi pembelajaran online), sirendokar (sistem remunerasi dosen dan karyawan), sirena (sistem anggaran dan belanja online), dan SITARI (Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Studi ini menyelidiki salah satu dari e-government tersebut yaitu SITARI. SITARI lahir dari kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas barang milik negara sebagai tuntutan dari civitas akademika dan kebutuhan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada negara karena pembelian barang menggunakan dana-dana yang berskala dari negara.

Pembahasan terkait BMN berkaitan dengan prinsip Manajemen Aset. Setiap organisasi, baik sektor publik maupun sektor privat, memiliki sebuah aset. Aset dikenal sebagai istilah “kekayaan”. Kekayaan yang dimaksud adalah barang yang dimiliki hak perorangan atau badan hukum dalam memiliki/menguasai barang dengan suatu hak atas barang berikut pengembangan yang melekat dan menjadi tanggung jawabnya. Menurut Siregar (2004), aset adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan).

Manajemen aset dalam pengelolaan BMN mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan, serta pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis selama siklus hidup aset. Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian uang. Manajemen aset yang baik dapat meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset. Secara garis besar, manajemen aset merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola kekayaan secara optimal, yaitu meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalkan ketersediaan dan penggunaan aset melalui proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kepemilikan/legal audit, penilaian,

pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, peremajaan, pengalihan, serta pengawasan aset (Wahyuni & Khoirudin, 2020).

Pengelolaan BMN berbasis elektronik yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya mengikuti pedoman Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.

Gambar 1. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 Universitas Sriwijaya

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tgl Data : 05/02/24 6:00 AM
 UAKPB : 677515 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Tgl Cetak : 05/02/24 2:29 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	3,823,998,555
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	655,780,729
117114	Suku Cadang	1,774,783,994
117131	Bahan Baku	1,667,157,751
117199	Persediaan Lainnya	69,889,176
131111	Tanah	11,134,095,771,000
132111	Peralatan dan Mesin	823,542,987,462
133111	Gedung dan Bangunan	916,961,253,760
134111	Jalan dan Jembatan	8,795,159,000
134112	Irigasi	5,206,348,000
134113	Jaringan	16,491,777,389
135111	Aset Tetap Renovasi	2,560,186,739
135121	Aset Tetap Lainnya	17,991,280,200
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	181,197,962,479
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(682,078,672,041)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(218,742,020,100)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(8,434,448,138)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1,590,979,149)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4,832,300,498)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(200,035,600)
162151	Software	6,975,460,266
162161	Lisensi	583,735,059
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3,772,608,930
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,713,286,692)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(265,345,851)
J U M L A H		12,203,309,052,420



 Palembang, 5 Februari 2024
 Penanggung Jawab UAKPB
 Pj. Kepala Biro Umum dan Keuangan
 Khairuddin, S.T., M.Si
 197612162001121002

Sumber: Universitas Sriwijaya (2024)

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa laporan posisi BMN Universitas Sriwijaya per tanggal 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023 di Neraca Posisi berjumlah Rp. 12.203.309.052.420. Pada neraca tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan aset yang diemban Universitas Sriwijaya seperti barang konsumsi, barang pemeliharaan, tanah, bangunan, *software*, dan lain-lain. Pengelolaan BMN ini dilakukan melalui sistem informasi yang bernama SITARI.

SITARI dibandingkan dengan e-government lain menarik perhatian peneliti karena kompleksitas kepentingan dan fitur sistem yang ia miliki. Dari sisi kepentingan, ada tuntutan besar dari warga universitas untuk transparansi dan akuntabilitas barang milik negara, untuk mengetahui status, keberadaan dan penggunaannya. Sementara itu dari sisi fitur, sistem ini meskipun baru, memiliki fitur yang cukup kompleks, bahkan dibandingkan dengan sistem yang dibuat oleh Lembaga lain maupun kementerian sekalipun, seperti SIMAN DJKN Kementerian Keuangan dan SI-ISYANA. Meskipun begitu, peneliti menyadari bahwa keberhasilan SITARI memerlukan pengukuran khusus karena ia merupakan jenis sistem informasi yang berbeda, dibanding dengan sistem informasi yang telah diselidiki oleh penelitian-penelitian selanjutnya. SITARI memerlukan perspektif dari pengguna yang berbeda yaitu auditor, pengguna di level universitas, dan civitas akademika. Untuk itu, ada tuntutan yang besar tentang bagaimana sistem e-government ini berkerja, mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berbeda.

Pada tahun 2022, pengelolaan BMN secara elektronik Universitas Sriwijaya dilakukan pengintegrasian dari SITARI ke Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi keuangan negara yang digunakan pada tingkat satuan kerja dengan menerapkan sistem integrasi database dan ber-interface langsung dengan Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN) pada tiap tahap siklus anggaran. SAKTI mempunyai fungsi utama yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Terdapat tujuh modul pada aplikasi SAKTI yaitu Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul General Ledger dan Pelaporan

SAKTI merupakan aplikasi yang menggantikan peran aplikasi-aplikasi eksisting yang sebelumnya masih menggunakan database terpisah antara lain:

RKAKL DIPA, SIMAK BMN, Persediaan, SAS, dan SAIBA. Sebagai gantinya, SAKTI telah menerapkan single database yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai administrator. Selain itu, SAKTI juga menggunakan sistem Single Entry Point, yaitu bahwa suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan di panggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan.

1.1.5 Gap Penelitian Tentang SIMAK-BMN

1. Gap Teori

Selama beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai SIMAK-BMN lebih mengarah pada lingkup rancangan sistem informasi (Atmaja & Susanto, 2019; Fiqi, 2019; Hutahaean & Azhar, 2018; Sataria & Siahaan, 2018; Sudrajat et al., 2021; Suhandono & Hidayat, 2020; Sumaryanto & Sumarna, 2022; THohari et al., 2022; Wirananda, 2020), Implementasi SIMAK-BMN (Hartanti, 2020; Palikhatun et al., 2019; Rismanda, 2020; Tampubolon, 2021), Efektivitas penerapan aplikasi (Meiforini et al., 2019; Palikhatun et al., 2019; Ramdany & Setiawati, 2021; Suprpti, 2018; Yanto & Muammar, 2021), praktisi akuntansi (Amaliah et al., 2019; Anisykurlillah & Oktaviana, 2020; Fajri & Fuadi, 2021; Hastuti et al., 2021; Kosadi & Supriatna, 2015; Nurpadi & Hermawati, 2021), evaluasi implementasi (Karambut et al., 2019; Sari, 2018), dan kinerja pegawai (Adriani & Suhairi, 2022; Firmansyah & Hollyson, 2021; Indarwati & Putranta, 2021; Peny, 2022). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih sangat jarang penelitian yang membahas SIMAK-BMN di lingkungan perguruan tinggi sehingga Gap Teori penelitian ini adalah membahas “Model Digitalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Sistem Organisasi Pelayanan Publik” yang berusaha mengisi ruang kosong penelitian tentang SIMAK-BMN, dengan menggunakan Technology Organization Environment (TOE) Framework (Tornatzky & Fleischer, 1990) dengan indikator Lingkungan, Organisasi, dan Teknologi, serta Teori Sistem dengan indikator Pengetahuan, Nilai, Kualitas, Adaptasi, dan Kompleksitas (Fenomena) (Mele et al., 2010). Selain itu, kebaruan dari penelitian ini adalah membahas elaborasi konsep transparansi dan akuntabilitas SIMAK-BMN.

2. Gap Empiris

Gap Empiris dari penelitian ini adalah SITARI memerlukan perspektif dari pengguna yang berbeda, yaitu pengguna di tingkat fakultas/lembaga/UPT maupun tingkat universitas, serta auditor. SITARI masih memiliki kekurangan seperti belum adanya inventarisasi untuk mengakomodir pencatatan tanah, gedung, bangunan, dan aset tetap lainnya, dan juga belum tersedianya pemutakhiran data secara rinci tentang BMN yang didokumentasikan, yang mana dapat mendukung validitas nilai aset tetap, meliputi volume, spesifikasi, dan kondisi, serta kurangnya kepedulian SDM yang mengelola BMN akan pentingnya mendata dan menginventaris barang-barang milik negara yang ada pada unit kerja masing-masing. SITARI ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas Barang Milik Negara sebagai pertanggungjawaban untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN di Universitas Sriwijaya.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memformulasikan pertanyaan penelitian dari berbagai kebutuhan praktis dan akademis tentang keberhasilan e-government dalam konteks universitas dengan mengambil satu rumusan masalah besar yaitu:

1. Bagaimana kapasitas Sistem Organisasi Publik dalam Adopsi Teknologi Informasi pada Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya?
2. Bagaimana Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya?
3. Faktor-faktor apakah sebagai penentu Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya?
4. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN melalui Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya?
5. Bagaimana Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI berbasis Sistem Organisasi Publik untuk Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Aset di Universitas Sriwijaya?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kapasitas Sistem Organisasi Publik dalam Adopsi Teknologi Informasi pada Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya
2. Untuk menganalisis Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penentu Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya
4. Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan aset BMN melalui Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI di Universitas Sriwijaya
5. Untuk Merumuskan Model Adopsi Teknologi Informasi dalam penggunaan Aplikasi SITARI berbasis Sistem Organisasi Publik untuk Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Aset di Universitas Sriwijaya

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian-penelitian yang membahas e-governement, yang secara spesifik dalam pembahasan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara di institusi pendidikan tinggi, mencari tahu faktor-faktor yang mendorong adopsi individu di institusi pendidikan tinggi pada e-government yang dikembangkan secara mandiri dalam hal ini adalah SITARI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SITARI oleh implementor, yaitu Petugas dan Sub Koordinator Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Sriwijaya), yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna (*user-centered e-government*), seperti Staf BMN Rektorat/ Fakultas/Lembaga/UPT, Auditor Internal dan Eksternal, serta Pimpinan Universitas. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan mampu mencari tahu kekurangan SITARI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, L., & Suhairi, S. (2022). Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Operator SIMAK BMN Mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara. *Jurnal Ecogen*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i1.12341>
- Ahmadi, S., & Mustonen-Ollila, E. (2011). ICT education and access: As strategies to generate and distribute e-Government content. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG*, 10–16.
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality, and Behavior*. Open University Press.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akram, M. S., Malik, A., Shareef, M. A., & Awais Shakir Goraya, M. (2019). Exploring the interrelationships between technological predictors and behavioral mediators in online tax filing: The moderating role of perceived risk. *Government Information Quarterly*, 36(2), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Al-Adaileh, R. M. (2009). An Evaluation of Information Systems Success: A User Perspective - the Case of Jordan Telecom Group. *European Journal of Scientific Research*, 37(2), 226–239.
- Al-Gore. (2000). Internationalization of E-Commerce. *Economic Perspectives*, 5(2).
- Al-Hujran, O., Al-dalahmeh, M., & Aloudat, A. (2011). The Role of National Culture on Citizen Adoption of e-Government Services: An Empirical Study. *Electronic Journal of E-Government*, 9(2), 93–106.
- Al-Shafi, S. H. (2009). *Factors Affecting E-Government Implementation and Adoption in the State of Qatar*. Brunel University, School of Information Systems, Computing and Mathematics.
- Al-Solbi, A. N. H., & Al-Harbi, S. H. (2008). An exploratory study of factors determining e-government success in Saudi Arabia. *Innovation and Knowledge Management in Business Globalization: Theory and Practice - Proceedings of the 10th International Business Information Management Association Conference*, 1–2, 914–918.
- Al Nidawy, B. Q. J., Sidek, S., & Al-Shami, S. S. A. (2018). Systematic review of critical factors and their dimensions influencing trust in e-government for usage or willing to use by citizens: Taxonomy, open challenges, motivation and recommendations | Revisión sistemática de los factores críticos y sus dimension. *Opcion*, 34(85), 2748–2794.
- Aldrich, H. (1979). *Organization and Environment*. Englewood Cliffs.
- Alshawi, S., & Alalwany, H. (2009). E-government evaluation: Citizen's perspective in developing countries. *Information Technology for Development*, 15(3), 193–208. <https://doi.org/10.1002/itdj.20125>
- Alshehri, M., & Drew, S. (2010). Challenges of e-Government Services Adoption

- in Saudi Arabia from an e-Ready Citizen Perspective. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 42(1), 1039–1045.
- Alshehri, M., Drew, S., Alhussain, T., & Alghamdi, R. (2012). The Effects of Website Quality on Adoption of E-Government Service: An Empirical Study Applying UTAUT Model Using SEM. *Proceeding of the 23rd Australasian Conference on Information (ACIS 2012)*, 1–13.
- Altwater, P., Hamschmidt, M., & Sehl. (2010). Prozessorientierte Hochschule: Neue Perspektiven für die Organisationsentwicklung. *Management*, 4, 42–47.
- Amaliah, T. H., Husain, S. P., & Selviyanti, N. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907>
- Anisykurlillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 127–139. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i2.25529>
- Apriliyanti, I. D., Kusumasari, B., Pramusinto, A., & Setianto, W. A. (2021). Digital divide in ASEAN member states: analyzing the critical factors for successful e-government programs. *Online Information Review*, 45(2), 440–460. <https://doi.org/10.1108/OIR-05-2020-0158>
- Atmaja, A. P., & Susanto, F. (2019). Optimasi Aplikasi SIMAK-BMN Untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Berbasis Aplikasi Mobile Android. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(2), 201–210.
- Au, N., Ngai, E. W. ., & Cheng, T. C. E. (2002). A critical review of end-user information system satisfaction research and a new research framework. *Omega*, 30(6), 451–478. [https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(02\)00054-3](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(02)00054-3)
- Auby, J.-F. (1996). *Management Public: Introduction générale*.
- Babakus, E., Yavas, U., Karatepe, O. M., & Avci, T. (2003). The Effect of Management Commitment to Service Quality on Employees' Affective and Performance Outcomes. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 31(3), 272–286. <https://doi.org/10.1177/0092070303031003005>
- Baecker, D. (2017). Agilität in der Hochschule. *Die Hochschule: Journal Für Wissenschaft Und Bildung*, 26(1), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.25656/01:16633>
- Bailey, C., Froggatt, K., Field, D., & Krishnasamy, M. (2002). The nursing contribution to qualitative research in palliative care 1990–1999: a critical evaluation. *Journal of Advanced Nursing*, 40(1), 48–60. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02339.x>
- Bank Dunia. (2009). *What is Governance?* Worldbank.Org.
- Bank Dunia. (2010). *Definition of E-Government*. Worldbank.Org.
- Banowosari, L. Y., Wicaksana, I. W. S., Wulandari, L., Purnamasari, D., & Setyana, P. (2014). Population metadata development to support data interoperability between government agencies in Indonesia. *ARPN Journal of*

- Engineering and Applied Sciences*, 9(11), 2045–2051.
- Barile, S. (2009). *Management sistemico vitale*. Giappichelli.
- Barile, S., & Polese, F. (2010). Linking the viable system and many-to-many network approaches to service-dominant logic and service science. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 2(1), 23–42. <https://doi.org/10.1108/17566691011026586>
- Bartoli, A. (2009). Dialogue as a Process for Transforming Relationships. In *The SAGE Handbook of Conflict Resolution* (pp. 376–391). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9780857024701.n20>
- Barton, T., Mueller, C., & Seel, C. (2019). *Hochschulen in Zeiten der Digitalisierung* (T. Barton, C. Müller, & C. Seel (Eds.)). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26618-9>
- Basu, S. (2004). E-government and developing countries: an overview. *International Review of Law, Computers & Technology*, 18(1), 109–132. <https://doi.org/10.1080/13600860410001674779>
- Bayern Recht. (2006). *Bayerisches Hochschulgesetz*.
- Becker, J. (2011). Was Ist Geschäftsprozessmanagement und Was Bedeutet Prozessorientierte Hochschule. Prozessorientierte Verwaltungsmodernisierung an Hochschulen. In *Prozessorientierte Hochschule. Allgemeine Aspekte und Praxisbeispiele* (pp. 8–22). BOCK + Herchen Verlag.
- Bergeron, F., Rivard, S., & de Serre, L. (1990). Investigating the Support Role of the Information Center. *MIS Quarterly*, 14(3), 247. <https://doi.org/10.2307/248887>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & McClure, C. R. (2008). Citizen-Centered E-Government Services: Benefits, Costs, and Research Needs". *Proceedings of the 2008 International Conference on Digital Government Research ACM Digital Library*, 137–142.
- Bhattacharya, D., Gulla, U., & Gupta, M. P. (2012). E-service quality model for Indian government portals: citizens' perspective. *Journal of Enterprise Information Management*, 25(3), 246–271. <https://doi.org/10.1108/17410391211224408>
- Bisjoe, A. (2018). Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (Focus Group Discussion): Belajar dari Praktik Lapang. *Info Teknis Eboni*, 15(1), 17–27.
- Bogdanovic-Dinic, S., Veljkovic, N., & Stoimenov, L. (2013). E-Government Development in Serbia. In *E-Government Implementation and Practice in Developing Countries* (pp. 265–290). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4090-0.ch012>
- Bolgherini, S. (2007). The Technology Trap and the Role of Political and Cultural Variables: A Critical Analysis of the E-Government Policies. *Review of Policy Research*, 24(3), 259–275. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2007.00280.x>
- Bolleyer, N. (2009). Inside the Cartel Party: Party Organisation in Government and

- Opposition. *Political Studies*, 57(3), 559–579. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00741.x>
- Boonmee, C. (2017). Mail-Doc-Web: A technique for faster, cheaper and more sustainable digital service development. *European Conference on Digital Government*, 36–46.
- Boschi, R. R. (1999). Descentralização, clientelismo e capital social na governança urbana: comparando Belo Horizonte e Salvador. *Dados*, 42(4), 655–690. <https://doi.org/10.1590/S0011-52581999000400002>
- Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory-The Skeleton of Science. *Management Science*, 2(3), 197–208.
- Brocke, J., Simons, A., Niehaves, B., Riemer, K., Plattfaut, R., & Cleven, A. (2009). Reconstructing the Giant: on the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. *17th European Conference On Information Systems*.
- Brooks, L., & Mohammed, A. B. (2014). eVoting in Nigeria. *Proceedings of the 2014 Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia - EGOSE '14*, 127–136. <https://doi.org/10.1145/2729104.2729106>
- Brownlie, D. (1994). *No The Marketing Book*.
- Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). *The management of innovation*. Tavistock.
- Burton-Jones, A., & Hubona, G. S. (2006). The mediation of external variables in the technology acceptance model. *Information & Management*, 43(6), 706–717. <https://doi.org/10.1016/j.im.2006.03.007>
- Bwalya, K. J., & Mutula, S. (2016). A conceptual framework for e-government development in resource-constrained countries. *Information Development*, 32(4), 1183–1198. <https://doi.org/10.1177/0266666915593786>
- Capra, F. (1997). *The web of life*. Doubleday-Anchor Book.
- Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>
- Chan, F., Thong, J., Venkatesh, V., Brown, S., Hu, P., & Tam, K. (2010). Modeling Citizen Satisfaction with Mandatory Adoption of an E-Government Technology. *Journal of the Association for Information Systems*, 11(10), 519–549. <https://doi.org/10.17705/1jais.00239>
- Chang, I.-C., Li, Y.-C., Hung, W.-F., & Hwang, H.-G. (2005). An empirical study on the impact of quality antecedents on tax payers' acceptance of Internet tax-filing systems. *Government Information Quarterly*, 22(3), 389–410. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.002>
- Chatfield, A. T., & Al-hujran, O. (2009). A cross-country comparative analysis of e-government service delivery among Arab countries. *Information Technology for Development*, 15(3), 151–170. <https://doi.org/10.1002/itdj.20124>
- Checkland, P. (1997). *Systems Thinking, Systems Practice*. John Wiley & Sons Ltd.

- Chen, C.-K., Cheng, J.-S., & Wang, K.-M. (2002). DEVELOPING AN E-GOVERNMENT PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM—A STUDY FROM CITIZEN SUBJECTIVE ASPECTS. *Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers*, 19(2), 39–52. <https://doi.org/10.1080/10170660209509190>
- Chen, Y.-C., & Gant, J. (2001). Transforming local e-government services: the use of application service providers. *Government Information Quarterly*, 18(4), 343–355. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00090-9](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00090-9)
- Chen, Y.-C., Hu, L.-T., Tseng, K.-C., Juang, W.-J., & Chang, C.-K. (2019). Cross-boundary e-government systems: Determinants of performance. *Government Information Quarterly*, 36(3), 449–459. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.001>
- Chen, Y. N., Chen, H. M., Huang, W., & Ching, R. K. H. (2006). E-Government Implementation Framework and Strategies in Developed vs. Developing Countries. *Journal of Global Information Management*, 14(1), 275–299. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-292-3.ch011>
- Chomchalao, S., & Naenna, T. (2013). Influence of System Traits and Personal Traits on the Acceptance of e-Government Service. *Information Technology Journal*, 12(5), 880–893. <https://doi.org/10.3923/itj.2013.880.893>
- Choudrie, J., Zamani, E. D., Umeoji, E., & Emmanuel, A. (2017). “Implementing e-government in Lagos State: understanding the impact of cultural perceptions and working practices. *Government Information Quarterly*, 34(4), 646–657.
- Christensen, H. S. (2021). A conjoint experiment of how design features affect evaluations of participatory platforms. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101538. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101538>
- Christopher, W. . . (2007). *Holistic Management: Managing What Matters for Company Success*. Hoboken:
- Colesca, S. E., & Dobrica, L. (2008). Adoption and use of E-Government services: The case of Romania. *Journal of Applied Research and Technology*, 6(03), 204–217. <https://doi.org/10.22201/icat.16656423.2008.6.03.526>
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publication.
- Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: conceptions, processes and antecedents. *Management and Organization Review*, 8(2), 423–454.
- Davies, D., & Dodd, J. (2002). Qualitative Research and the Question of Rigor. *Qualitative Health Research*, 12(2), 279–289. <https://doi.org/10.1177/104973230201200211>
- Davies, J., & Procter, R. (2020). Online platforms of public participation. In S. D. C. Y. C. M.A (Ed.), *Proceedings of the 13th International Conference on*

- Theory and Practice of Electronic Governance* (pp. 746–753). ACM. <https://doi.org/10.1145/3428502.3428614>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982–1003. <https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982>
- Dawes, S. S. (2008). The evolution and continuing challenges of e-governance. *Public Administration Review*, 68, S86–S102.
- DeBenedictis, A., Howell, W., Figueroa, R., & Boggs, R. A. (2002). *E-Government Defined: An Overview of the Next Big Information Technology Challenge*. International Association for Computer Information Systems IEEE Computer Society.
- Deloitte Research. (2000). *At the Dawn of E-Government: The Citizen as Customer - State Government Approaches to Customer Service*. Deloitte Consulting and Deloitte & Touche.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information Systems Research*, 3(1), 60–95. <https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2002). Information systems success revisited. *Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2966–2976. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2002.994345>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2004). Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone & McLean Information Systems Success Model. *International Journal of Electronic Commerce*, 9(1), 31–47. <https://doi.org/10.1080/10864415.2004.11044317>
- DeLone, W., & McLean, E. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dias, G. P. (2020). Global e-government development: besides the relative wealth of countries, do policies matter? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2019-0125>
- Dillon, A., & Morris, M. G. (1996). User Acceptance of Information Technology: Theories and Models. *Journal of the American Society for Information Science*, 31(3), 3–32.
- Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2008). Demographic influence on UK citizens' e-government adoption. *Electronic Government, an International Journal*, 5(3), 261. <https://doi.org/10.1504/EG.2008.018874>
- Dwivedi, Y. K., Williams, M. D., & Venkatesh, V. (2008). Guest Editorial: A profile of adoption of Information & Communication Technologies (ICT) research in the household context. *Information Systems Frontiers*, 10(4), 385–

390. <https://doi.org/10.1007/s10796-008-9101-8>

- E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)*. (2020).
- Easwaramoorthy, M., & Zarinpoush, F. (2002). *Interviewing for Research*. Canada Volunteerism Initiative.
- Ebrahim, Z. A. (2005). *The Adoption of E-Government in the Kingdom of Bahrain*. Brunel University.
- Ehrhardt, A., & Esche, T. (2017). Agile Konzepte als Komplexitätslöser für die Hochschulen? *Wissenschafts Management*.
- Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. *Journal of Applied Psychology*, 75(1), 51–59. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.75.1.51>
- Entwistle, T., Bristow, G., Hines, F., Donaldson, S., & Martin, S. (2007). The Dysfunctions of Markets, Hierarchies and Networks in the Meta-governance of Partnership. *Urban Studies*, 44(1), 63–79. <https://doi.org/10.1080/00420980601023836>
- Evans, D., & Yen, D. C. (2005). E-government: An analysis for implementation: Framework for understanding cultural and social impact. *Government Information Quarterly*, 22(3), 354–373. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.007>
- Fajri, A. M., & Fuadi, R. (2021). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kantor Kementrian Negara/Lembaga Wilayah Aceh). *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(2), 192–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v6i2.18547>
- Fan, B., & Zhao, Y. (2017). The moderating effect of external pressure on the relationship between internal organizational factors and the quality of open government data. *Government Information Quarterly*, 34(3), 396–405.
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. *International Journal of the Computer, the Internet, and Management*, 10(2), 1–22.
- Fauzie, A., Budi, I., Indra Sensuse, D., Imanda, R., Satria, W. I., & Catur W, W. (2016). Definition of e-Hajj in Indonesia using hermeneutic approach. *2016 IEEE Student Conference on Research and Development (SCORED)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SCORED.2016.7810042>
- Ferro, E., & Sorrentino, M. (2010). Can intermunicipal collaboration help the diffusion of E-Government in peripheral areas? Evidence from Italy. *Government Information Quarterly*, 27(1), 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.07.005>
- Fiqi, B. (2019). Sistem Informasi Manajemen Inventaris Barang Milik Negara (Si Mitra) Pada Program Kegiatan Unit Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana. *Jurnal Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana*, 3(2), 150. <https://doi.org/10.29122/alami.v3i2.3779>

- Firmansyah, A., & Hollyson, R. (2021). Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia. *Ekombis Sains: Jurnal Keuangan, Ekonomi, Dan Bisnis*, 6(2), 177–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i2.1529>
- Ford, D. (2002). *Understanding Business Marketing and Purchasing*. Thomson.
- Gall, M., Gall, J., & Borg, R. (2007). *Educational research: An introduction* (8th ed.). NY: Pearson Education.
- Galpaya, H., Samarajiva, R., & Soysa, S. (2007). Taking e-government to the bottom of the pyramid. *Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance - ICEGOV '07*, 233. <https://doi.org/10.1145/1328057.1328105>
- Gascó, M. (2005). Exploring the E-Government Gap in South America. *International Journal of Public Administration*, 28(7–8), 683–701. <https://doi.org/10.1081/PAD-200064235>
- Gattiker, U. E. (1984). Managing Computer-Based Office Information Technology: A Process Model for Management. In Hendrick & O. Brown (Eds.), *Human Factors in Organizational Design* (pp. 395–403). Elsevier.
- Gautrin, H.-F. (2004). *Connecting Quebec to its Citizens. Report on E-Government for Verdun, Parliamentary Assistant to the Premier*.
- Gefen, D. (2002). Customer Loyalty in E-Commerce. *Journal of the Association for Information Systems*, 3(1), 27–53. <https://doi.org/10.17705/1jais.00022>
- Gell-Mann, M. (1994). *The Quark and the Jaguar. Adventures in the Simple and the Complex*. W.H. Freeman.
- Gemoets, L. A., Mahmood, M. A., Diaz, B. A., & Gonzalez, P. (2011). A cross-national comparison of e-government success measures: a theory-based empirical research. *International Journal of Electronic Governance*, 4(3), 184. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2011.043815>
- George, T. (2023). *What Is Qualitative Observation? Definition & Examples*. Scribbr.
- Gil-Garcia, J. R., Berg, S. A., Pardo, T. A., Burke, G. B., & Guler, A. (2009). Conducting Web-Based Surveys of Government Practitioners in Social Sciences: Practical Lessons for E-Government Researchers. *Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences*, 1–10.
- Gilbert, D., Balestrini, P., & Littleboy, D. (2004). Barriers and benefits in the adoption of e-government. *International Journal of Public Sector Management*, 17(4), 286–301. <https://doi.org/10.1108/09513550410539794>
- Gilch, H. (2019). *Digitalisierung der Hochschulen: Ergebnisse einer Schwerpunktstudie für die Expertenkommission Forschung und Innovation*. Expertenkommission Für Forschung Und Innovation (EFI).
- Gisquet, E. (2020). Impossibility of Narrative Bridges across Boundaries: Case Study of Fukushima-Daiichi Accident. *Natural Hazards Review*, 21(4), 05020010. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000406](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000406)
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Giudice, M. Del, Dimitriou, S., & Michael,

- P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager's perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, 119880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880>
- Golinelli, G. M. (2009). L'approccio sistemico vitale: nuovi orizzonti di ricerca per il governo dell'impresa. *Sinergie*, 80, IX–XXII.
- Golinelli, G. M. (2010). *Viable Systems Approach (VSA): Governing Business Dynamics*. CEDAM.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-Technology Fit and Individual Performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213. <https://doi.org/10.2307/249689>
- Goodin, R. E. (2017). The epistemic benefits of deliberative democracy. *Policy Sciences*, 50(3), 351–366. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9286-0>
- Gow, J. I., & Dufour, C. (2000). Is the New Public Management a Paradigm? Does it Matter? *International Review of Administrative Sciences*, 66(4), 573–597.
- Grant, R. M., Shani, R., & Krishnan, R. (1994). TQM's Challenge to Management Theory and Practice. *Sloan Management Review*, 35(2).
- Gronau, S., Winter, E., & Grote, U. (2017). Modelling nature-based tourism impacts on rural development and conservation in Sikunga Conservancy, Namibia. *Development Southern Africa*, 34(3), 276–294. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2016.1269638>
- Gronlund, A. (2005). What's In a Field - Exploring the eGovernment Domain. *Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 125a-125a. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2005.690>
- Gunawan, H., Wee, S. Y., & Rina, R. B. R. I. (2020). A Model of the E-Wallet Adoption in Small and Medium Enterprises (SME) Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 98(20), 3100–3111.
- Gunawong, P., & Gao, P. (2017). Understanding e-government failure in the developing country context: a process-oriented study. *Information Technology for Development*, 23(1), 153–178. <https://doi.org/10.1080/02681102.2016.1269713>
- Guntur, M., Purwandari, B., Raharjo, T., Solichah, I., & Kumaralalita, L. (2018). Critical Success Factors for Information Systems Development. *Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Information Management*, 29–33. <https://doi.org/10.1145/3278252.3278288>
- Guță, A. J. (2012). Characteristics of Public Sector Management. *Annals of the University of Petroșani Economics*, 12(4), 95–102.
- Haak, E., Ubacht, J., Van den Homberg, M., Cunningham, S., & Van den Walle, B. (2018). A framework for strengthening data ecosystems to serve humanitarian purposes. *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age*, 1–9. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209326>
- Håkansson, H., & Snehota, I. (1989). No business is an island: The network concept of business strategy. *Scandinavian Journal of Management*, 5(3), 187–200. [https://doi.org/10.1016/0956-5221\(89\)90026-2](https://doi.org/10.1016/0956-5221(89)90026-2)

- Hamilton, B. A. (2001). *E-Government Maturity Model: From Assessment to Action*. Boozallen.Com.
- Hanefeld, J., Mayhew, S., Legido-Quigley, H., Martineau, F., Karanikolos, M., Blanchet, K., Liverani, M., Yei Mokuwa, E., McKay, G., & Balabanova, D. (2018). Towards an understanding of resilience: responding to health systems shocks. *Health Policy and Planning*, 33(3), 355–367. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx183>
- Harrison, A. W., & Rainer, R. K. (1992). The Influence of Individual Differences on Skill in End-User Computing. *Journal of Management Information Systems*, 9(1), 93–111. <https://doi.org/10.1080/07421222.1992.11517949>
- Hartanti, A. (2020). Analisis SIMAK-BMN Dalam Pengendalian Internal Barang Milik Negara (Studi Pada Balai Bahasa Yogyakarta). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(3), 1–15.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *JRTA: Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(1), 40–51.
- Hastuti, Barnas, B., Rufaedah, Y., Suciyani, W. O., & Mulyana, D. (2021). The Effect of Employee Competence, Leadership Commitment, and Internal Audit Role on the Quality of State Property Accounting Information. *Proceedings of the 2nd International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2021)*. <https://doi.org/10.2991/aer.k.211106.103>
- Heeks, R. (2003). E-Government in Africa: Promise and Practice. *Information Polity*, 7(2,3), 97–114. <https://doi.org/10.3233/IP-2002-0008>
- Heeks, R., & Bailur, S. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. *Government Information Quarterly*, 24(2), 243–265. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.06.005>
- Heinze, N., & Hu, Q. (2005). E-Government Research: A Review via the Lens of Structuration Theory. *9th Pacific Asia Conference on Information Systems: I.T. and Value Creation, PACIS 2005*, 891–904.
- Heng Wang, & Jinchang Hou. (2010). An integrated approach to developing a successful one-stop portal e-government. *2010 3rd International Conference on Computer Science and Information Technology*, 7, 511–514. <https://doi.org/10.1109/ICCSIT.2010.5564882>
- Hidayat, M. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Laksbang Press Indo.
- Ho, A. T. (2002). Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative. *Public Administration Review*, 62(4), 434–444. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00197>
- Hoffman, D. K. (2003). Marketing + MIS = E-Service. *Communications of the ACM*, 46(6), 53–55.
- Holden, S. H., & Fletcher, P. D. (2005). The Virtual Value Chain and E-Government Partnership: Non-Monetary Agreements in the IRS E-File Program. *International Journal of Public Administration*, 28(7–8), 643–664. <https://doi.org/10.1081/PAD-200064223>

- Holland, J. H. (1999). *Emergence: from chaos to order*. Perseus Books.
- Hood, C. (2005). *Public Management: The Word, the Movement, the Science*.
- HRK-Mitgliederversammlung. (2020). *Micro-Degrees und Badges als Formate digitaler Zusatzqualifikation*. HRK: Hochschulrektorenkonferenz Die Stimme Der Hochschulen.
- Hu, G., Pan, W., Lu, M., & Wang, J. (2009). The widely shared definition of e-Government. *The Electronic Library*, 27(6), 968–985. <https://doi.org/10.1108/02640470911004066>
- Hussein, R., Karim, N. S. A., Mohamed, N., & Ahlan, A. R. (2007). The Influence of Organizational Factors on Information Systems Success in E-Government Agencies in Malaysia. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 29(1), 1–17. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2007.tb00195.x>
- Hutahaean, J., & Azhar, Z. (2018). Sistem Informasi Laporan Penilaian Barang Milik Negara berbasis Web (Studi Kasus: KPKNL Kisaran). *Riau Journal of Computer Science*, 4(2), 19–30.
- Hwang, K., & Choi, M. (2017). Effects of innovation-supportive culture and organizational citizenship behavior on e-government information system security stemming from mimetic isomorphism. *Government Information Quarterly*, 34(2), 183–198. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.02.001>
- Imran, A., & Gregor, S. (2005). Strategies for ICT use in the public sector in the least developed countries: A crosscountry analysis. *ACIS 2005 Proceedings - 16th Australasian Conference on Information Systems*, 1–11.
- Imran, A., & Gregor, S. (2019). Conceptualising an IT mindset and its relationship to IT knowledge and intention to explore IT in the workplace. *Information Technology & People*, 32(6), 1536–1563. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2017-0115>
- Indarwati, D., & Putranta, E. A. H. (2021). Evaluasi Kinerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Polda DIY. *JRABI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.350>
- INTOSAI Standing Committee on IT Audit. (2003). *Auditing e-Government: Lifecycle Risks and Setting up a Database*.
- İskender, G., & Özkan, S. (2013). E-government transformation success. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(3), 364–392. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2012-0008>
- Islam, M. ., & Ahmed, A. M. . (2007). Understanding E-Governance: A Theoretical Approach. *Asian Affairs*, 29(4), 29–46.
- Ives, B., & Olson, M. H. (1984). User Involvement and MIS Success: A Review of Research. *MANAGEMENT SCIENCE*, 30(5), 586–603.
- Jackson, M. (2003). *Systems Thinking: Creative Holism for Managers*. John Wiley & Sons Ltd.
- Jaeger, P. T., & Thompson, K. M. (2003). E-government around the world: lessons,

- challenges, and future directions. *Government Information Quarterly*, 20(4), 389–394. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>
- Jones, L. R. (2005). Understanding Public Management as an International Academic Field. *International Public Management Review*, 6(1), 15–22.
- Kanat, İ. E., & Özkan, S. (2009). Explaining Citizen Adoption of Government to Citizen Services: A Model Based on Theory of Planned Behaviour (TBP). *Transforming Government: People, Process and Policy*, 3(4), 406–419.
- Karambut, A. M., Morasa, J., & Warongan, J. D. . (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 237–242. <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25477.2019>
- Karavasilis, I., Zafiroopoulos, K., & Vrana, V. (2010). Extending TAM to Understand E-Governance Adoption by Teachers in Greece. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 112, pp. 57–68). https://doi.org/10.1007/978-3-642-16324-1_7
- Kassen, M. (2019). Promoting public cooperation in government: key drivers, regulation, and barriers of the e-collaboration movement in Kazakhstan. *International Review of Administrative Sciences*, 85(4), 743–762. <https://doi.org/10.1177/0020852317735595>
- Khalil, O. E. M. (2011). e-Government readiness: Does national culture matter? *Government Information Quarterly*, 28(3), 388–399. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.011>
- Khan, G. F., Moon, J., Rhee, C., & Rho, J. J. (2010). E-government Skills Identification and Development: Toward a Staged-Based User-Centric Approach for Developing Countries. *Asia Pacific Journal of Information Systems*, 20(1), 1–31.
- Kim, C.-K. (2007). A Cross-national Analysis of Global E-government. *Public Organization Review*, 7(4), 317–329. <https://doi.org/10.1007/s11115-007-0040-5>
- Kim, S. E., & Lee, J. W. (2009). The Impact of Management Capacity on Government Innovation in Korea: An Empirical Study. *International Public Management Journal*, 12(3), 345–369. <https://doi.org/10.1080/10967490903103334>
- King, J. L., Gurbaxani, V., Kraemer, K. L., McFarlan, F. W., Raman, K. S., & Yap, C. S. (1994). Institutional Factors in Information Technology Innovation. *Information Systems Research*, 5(2), 139–169. <https://doi.org/10.1287/isre.5.2.139>
- Kolsaker, A., & Lee-Kelley, L. (2007). ‘Mind the Gap II’: E-Government and E-Governance. In *Electronic Government: Vol. LNCS 4656* (pp. 35–43). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74444-3_4
- Kosadi, F., & Supriatna, E. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Kualitas Laporan Barang Milik Negara pada Pusat Sumber Daya Mineral

- Batubara Dan Panas Bumi. *Jurnal Indonesia Membangun*, 14(1), 136–147.
- Krina, L. P. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas birokrasi publik: Sketsa pada masa transisi*. Pustaka Belajar.
- Kusumastuti, H., Supriyono, B., Mindarti, L. I., & Wanto, A. H. (2020). The capacity and innovation of services in organizing village governance in Indonesia. *Revista Opcion*, 36(Special edition 26), 1681–1696.
- Kvale. (1991). Review of Issues of Validity in Qualitative Research. *Contemporary Psychology: A Journal of Reviews*, 36(1), 82–82. <https://doi.org/10.1037/029375>
- Kwok, C. (2014). Implementing successful G2B initiatives in the HKSAR. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 12(3), 219–244. <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2014-0011>
- LaVigne, M. (2002). Electronic Government: A Vision of Future that is Already Here". *Syracuse Law Review*, 52(4), 1243–1251.
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Differentiation and Integration in Complex Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.2307/2391211>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Lean, O. K., Zailani, S., Ramayah, T., & Fernando, Y. (2009). Factors Influencing Intention to Use e-Government Services Among Citizens in Malaysia. In *Citizens and E-Government* (Vol. 29, Issue 6, pp. 334–359). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-61520-931-6.ch019>
- Lee, J.-S., & Jun, S.-P. (2021). Privacy-preserving data mining for open government data from heterogeneous sources. *Government Information Quarterly*, 38(1), 101544. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101544>
- Lee, J. B., & Porumbescu, G. A. (2019). Engendering inclusive e-government use through citizen IT training programs. *Government Information Quarterly*, 36(1), 69–76.
- Lee, J., Kim, D. J., & Rao, H. R. (2005). An Examination of Trust Effects and Pre-existing Relational Risks in e-Government Services. *Proceedings of the Eleventh Americas Conference on Information Systems*, 1949–1954.
- Legris, P., Ingham, J., & Collette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. *Information & Management*, 40(3), 191–204. [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(01\)00143-4](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(01)00143-4)
- Lewes District Council. (2005). *Asset Management Plan [Government]*. [Www.Lewes.Gov.Uk](http://www.Lewes.Gov.Uk).
- Liikanen, E. (2003). *E-Government for Europe's Public Services of the Future*. Inaugural Lecture.

- Linders, D., Liao, C. Z. P., & Wang, C. M. (2018). Proactive e-governance: flipping the service delivery model from pull to push in Taiwan. *Government Information Quarterly*, 35(4), S68–S76.
- Liu, S. M., & Yuan, Q. (2015). The Evolution of Information and Communication Technology in Public Administration. *Public Administration and Development*, 35(2), 140–151. <https://doi.org/10.1002/pad.1717>
- Lock, R., Cooke, L., & Jackson, T. (2013). Online Social Networking, Order and Disorder. *EJEG: Electronic Journal of E-Government*, 11(2), 229–240.
- Luhmann, N. (1990). *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Suhrkamp Verlag.
- Lundgren, R. E., & McMakin, A. H. (2009). *Risk Communication: A Handbook for Communicating Environmental, Safety, and Health Risks* (4th ed.). Wiley-IEEE Press.
- Lynn, L. E., Heinrich, C. J., & Hill, C. J. (2001). A Logic For Governance Research. In *Improving Governance: A New Logic For Empirical Research*. In *In Improving Governance: A New Logic For Empirical Research*. Georgetown University Press.
- Madyatmadja, E. D., Abdurachman, E., Gaol, F. L., & Pudjianto, B. W. (2018). Social media based government continuance from an expectation confirmation on citizen experience. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(7), 869–876.
- Madyatmadja, E. D., & Kiswanto, L. J. (2019). Social Media-Based E-Government Application Feature. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(3), 4203–4209. <https://doi.org/10.35940/ijrte.C6036.098319>
- Majeed, B., Niazi, H. A. K., & Sabahat, N. (2019). E-Government in Developed and Developing Countries: A Systematic Literature Review. *2019 International Conference on Computing, Electronics & Communications Engineering (ICCECE)*, 112–117. <https://doi.org/10.1109/iCCECE46942.2019.8941963>
- Mangla, S. K., & Luthra, S. (2022). When challenges need an evaluation: for operational excellence and sustainability orientation in humanitarian supply and logistics management. *Production Planning & Control*, 33(6–7), 539–557. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1834129>
- Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. *State and Local Government Review*, 50(1), 56–66. <https://doi.org/10.1177/0160323X18763964>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1989). *Rediscovering Institutions*. Free Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Masrek, M. N., Karim, N. S. A., & Hussein, R. (2007). Investigating corporate intranet effectiveness: a conceptual framework. *Information Management & Computer Security*, 15(3), 168–183. <https://doi.org/10.1108/09685220710759522>

- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1975). *BLC Report 9: Autopoietic systems*.
- Meiforini, H., Isharijadi, & Styaningrum, F. (2019). Analisis Efektivitas dan Kemudahan Aksesibilitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Rumah Sakit Umum Daerah. *THE 13th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 7(2), 223–236.
- Meijer, A., & Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. *Government Information Quarterly*, 32(3), 237–245. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.006>
- Mele, C., Pels, J., & Polese, F. (2010). A Brief Review of Systems Theories and Their Managerial Applications. *Service Science*, 2(1–2), 126–135. https://doi.org/10.1287/serv.2.1_2.126
- Mele, C., & Polese, F. (2010). *Key dimensions of Service Systems: Interaction in social & technological networks to foster value co-creation*, in Demirkan,. Springer.
- Mensah, R., Cater-Steel, A., & Toleman, M. (2020). A framework for selection of processes to virtualize in e-government: A case study of Liberia. *PACIS 2020 Proceedings*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publication.
- Misra, D. C. (2008). *Ten Guiding Principles for E-government, Case Studies of Innovative e-government Solutions, Services and Applications* edn. United Nations Public Administration Network.
- Mitra, R. K., & Gupta, M. P. (2008). A Contextual Perspective of Performance Assessment in E-Government: A Study of Indian Police Administration. *Government Information Quarterly*, 25(2), 278–302. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.03.008>
- Moon, J., Choe, Y. C., Chung, M., Jung, gu H., & Swar, B. (2016). IT outsourcing success in the public sector. *Information Development*, 32(2), 142–160. <https://doi.org/10.1177/0266666914528930>
- Moore, G. C., & Benbasat, I. (1991). Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation. *Information Systems Research*, 2(3), 192–222. <https://doi.org/10.1287/isre.2.3.192>
- Moreno Cegarra, J. L., Cegarra Navarro, J. G., & Córdoba Pachón, J. R. (2014). Applying the technology acceptance model to a Spanish City Hall. *International Journal of Information Management*, 34(4), 437–445. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.02.006>
- Morris, M. G., & Venkatesh, V. (2000). AGE DIFFERENCES IN TECHNOLOGY ADOPTION DECISIONS: IMPLICATIONS FOR A CHANGING WORK FORCE. *Personnel Psychology*, 53(2), 375–403. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00206.x>
- Mousavi, A., Pimenidis, E., & Jahankhani, H. (2008). Using a best practice case in evaluating e-government potential in iranian cities. *European Conference in Electronic Government (ECEG)*, 415–426.

- Mutula, S. M. (2005). Bridging the digital divide through e-governance. *The Electronic Library*, 23(5), 591–602. <https://doi.org/10.1108/02640470510631308>
- Naidoo, G. (2008). E-Government Initiatives to Improve Service Delivery: An Evaluation of South Africa. *Proceedings of 4th International Conference on E-Government, ICEG 2008*, 291–298.
- Naidoo, R., & Palk, W. (2010). Are e-Government investments delivering against expected payoffs? Evidence from the United Kingdom and South Africa. *IST-Africa*.
- Nandasara, S. T. (2012). Evolution of Computer Science Education in the Purview of Free Education. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology* (Vol. 387, pp. 127–142). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33899-1_10
- Nasrun Mohd Nawi, M., Roslan, S., Azita Salleh, N., Zulhumadi, F., Nahar Harun, A., Malaysia, T., Sultan Yahya Petra, J., & Lumpur, K. (2016). International Journal of Economics and Financial Issues The Benefits and Challenges of E-procurement Implementation: A Case Study of Malaysian Company. *International Journal of Economics and Financial Issues* |, 6(7), 329–332.
- Ndou, V. D. (2004). E - Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18(1), 1–24. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2004.tb00117.x>
- Nelson, R. R., Todd, P. A., & Wixom, B. H. (2005). Antecedents of Information and System Quality: An Empirical Examination Within the Context of Data Warehousing. *Journal of Management Information Systems*, 21(4), 199–235. <https://doi.org/10.1080/07421222.2005.11045823>
- Ngwenya, B. (2013). E-Government for Social and Economic Development. In *Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG* (pp. 21–43). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4245-4.ch002>
- Nograšek, J. (2011). Change Management as a Critical Success Factor in e-Government Implementation. *BSRJ*, 2(2), 13–24. <https://doi.org/10.2478/v10305-012-0016-y>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
- Nurpadi, D., & Hermawati, M. (2021). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 178–186.
- O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(1), 20–32. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860>
- Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and

- emerging economies. *Computers, Environment and Urban Systems*, 27(6), 585–607. [https://doi.org/10.1016/S0198-9715\(03\)00016-4](https://doi.org/10.1016/S0198-9715(03)00016-4)
- OECD. (2003). *The e-Government Imperative*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264101197-en>
- ÖKTEM, M. K., DEMİRHAN, K., & DEMİRHAN, H. (2014). The Usage of E-Governance Applications by Higher Education Students. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 14(5), 1925–1943. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.5.2051>
- Oyekunle, R. A., & Akanbi-Ademolake, H. B. (2014). An Overview of E-Government Technological Divide in Developing Countries. In *Technology Development and Platform Enhancements for Successful Global E-Government Design* (pp. 307–321). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4900-2.ch016>
- Ozkan, S., & Kanat, I. E. (2011). e-Government adoption model based on theory of planned behavior: Empirical validation. *Government Information Quarterly*, 28(4), 503–513. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.10.007>
- Palikhatun, L. F., Apriliyana, & Payamta. (2019). Asset Management Based On Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (BLU) Universitas Sebelas Maret Surakarta. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(1), 1–10.
- Panganiban, G. G. F. (2019). E-governance in agriculture: digital tools enabling Filipino farmers. *Journal of Asian Public Policy*, 12(1), 51–70. <https://doi.org/10.1080/17516234.2018.1499479>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41. <https://doi.org/10.2307/1251430>
- Parent, M., Vandebeek, C. A., & Gemino, A. C. (2005). Building Citizen Trust Through E-government. *Government Information Quarterly*, 22(4), 720–736. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.10.001>
- Parenteau, R. (1994). *Peut-on parler de management public?*
- Patsioura, F. (2014). Evaluating E-Government. In *Evaluating Websites and Web Services: Interdisciplinary Perspectives on User Satisfaction* (pp. 1–18). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5129-6.ch001>
- Payette, A. (1992). *Éléments pour une conception du management public*.
- PBB. (2008). *United Nations E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance*. World Future Society.
- PBB. (2010). *E-Government Survey 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis*. UN Publishing Section.
- PBB, & American Society for Public Administration. (2002). *Benchmarking E-Government: A Global Perspective*. United Nations/American Society for Public Administration.

- Pedersen, K. (2017). Realizing e-government benefits with minimal capabilities. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(2), 262–285. <https://doi.org/10.1108/TG-11-2016-0083>
- Peny, T. L. L. (2022). Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 2127–2142. <https://doi.org/10.36778/jesy.v5i2.812>
- Phang, C. W., Sutanto, J., Kankanhalli, A., Li, Y., Tan, B. C. Y., & Teo, H.-H. (2006). Senior Citizens' Acceptance of Information Systems: A Study in the Context of e-Government Services. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 53(4), 555–569. <https://doi.org/10.1109/TEM.2006.883710>
- Pitts, D. W., & Fernandez, S. (2009). The State of Public Management Research: An Analysis of Scope and Methodology. *International Public Management Journal*, 12(4), 399–420.
- Plouffe, C. R., Hulland, J. S., & Vandenbosch, M. (2001). Research Report: Richness Versus Parsimony in Modeling Technology Adoption Decisions—Understanding Merchant Adoption of a Smart Card-Based Payment System. *Information Systems Research*, 12(2), 208–222. <https://doi.org/10.1287/isre.12.2.208.9697>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Pongratz, J. C. A. (2017). *IT-Architektur für die Digitale Hochschule*. TUM.
- Pons, A. (2004). E-Government for Arab Countries. *Journal of Global Information Technology Management*, 7(1), 30–46. <https://doi.org/10.1080/1097198X.2004.10856365>
- Potosky, D. (2007). The Internet knowledge (iKnow) measure. *Computers in Human Behavior*, 23(6), 2760–2777. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2006.05.003>
- Prybutok, V. R., & Spink, A. (1999). Transformation of a health care information system: a self-assessment survey. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 46(3), 299–310. <https://doi.org/10.1109/17.775282>
- Purnastuti, L., & Izzaty, R. E. (2016). Access and Equity in Higher Education in Indonesia. In *Widening Higher Education Participation* (pp. 119–134). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100213-1.00008-1>
- Rahman, H. (2007). E-government readiness. *Proceedings of the 1st International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance - ICEGOV '07*, 232, 225. <https://doi.org/10.1145/1328057.1328104>
- Rain. (1990). *No Title*.
- Rainey, H. G. (1990). *Public Management: Recent Developments and Current Prospects*.
- Raman, M., Kaliannan, M., & Yu, C. M. (2007). E-business and E-government: Issues and Challenges in Malaysia. *Information Technology Journal*, 6(3), 428–434. <https://doi.org/10.3923/itj.2007.428.434>

- Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (BMN). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 310–323. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.345>
- Ramtohum, A., & Soyjaudah, K. M. S. (2013). Service-orientation method to realise government e-services in SADC. *VINE*, 43(2), 237–258. <https://doi.org/10.1108/03055721311329972>
- Rismanda. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam Pengelolaan Aset Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Pancabudi*, 2(2).
- Roessobiyatno, Anggoro, T. P., Nainggolan, B., & Purwandesi, E. (2016). Social media analysis supporting smart city implementation (Practical study in Bandung district). *2016 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*, 80–86. <https://doi.org/10.1109/ICTSS.2016.7792853>
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations* (3rd ed.). The Free Press.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
- Rokhman, A. (2011). E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 2(5), 228–236.
- Rorissa, A., & Demissie, D. (2010). An analysis of African e-Government service websites. *Government Information Quarterly*, 27(2), 161–169. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.003>
- Rose, J., Flak, L. S., & Sæbø, Ø. (2018). Stakeholder theory for the E -government context: Framing a value-oriented normative core. *Government Information Quarterly*, 35(3), 362–374. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.06.005>
- Saha, P., Nath, A., & Salehi-Sangari, E. (2010). Success of Government E-Service Delivery: Does Satisfaction Matter? *IFIP International Federation for Information Processing EGOV 2010, LNCS 6228*, 204–215.
- Sambasivan, M., Patrick Wemyss, G., & Che Rose, R. (2010). User acceptance of a G2B system: a case of electronic procurement system in Malaysia. *Internet Research*, 20(2), 169–187. <https://doi.org/10.1108/10662241011032236>
- Sardjono, W., Harisno, Perdana, W. G., Pujadi, T., & Iskandar, K. (2020). Critical success factor measurement model implementation of natural disaster mitigation knowledge management systems. *AIP Conference Proceedings*, 2245, 020002. <https://doi.org/10.1063/5.0006797>
- Sari, A. D. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 3(2). <https://doi.org/10.32528/jiai.v3i2.1931>
- Sataria, I., & Siahaan, K. (2018). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Berbasis Web pada Sekretariat Jenderal DPD RI. *Jurnal MSI: Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 1120–1129.
- Schaupp, L. C., Carter, L., & McBride, M. E. (2010). E-file adoption: A study of

- U.S. taxpayers' intentions. *Computers in Human Behavior*, 26(4), 636–644. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.12.017>
- Schelin, S. H. (2003). E-Government. In D. Garson (Ed.), *Modern Public Information Technology Systems* (pp. 110–126). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-051-6.ch006>
- Schmid, U., Goertz, L., Radomski, S., Thom, S., & Behrens, J. (2017). *Monitor Digitale Bildung. Die Hochschulen im Digitalen Zeitalter*. Bertelsmann Stiftung.
- Schuppan, T. (2009). E-Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa. *Government Information Quarterly*, 26(1), 118–127. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006>
- Seale, C. (1999). Quality in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 5(4), 465–478. <https://doi.org/10.1177/107780049900500402>
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday Currency.
- Senjaya, A., Sule, E. T., Effendi, N., & Cahyandito, M. F. (2020). Effect of corporate governance and risk management against corporate sustainability at the coal mining industry in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(2), 1–12.
- Serrano-Cinca, C., & Muñoz-Soro, J. F. (2019). What municipal websites supply and citizens demand: a search engine optimisation approach. *Online Information Review*, 43(1), 7–28. <https://doi.org/10.1108/OIR-02-2018-0042>
- Shahkooh, K. A., Saghafi, F., & Abdollahi, A. (2008). A Proposed Model for E-Government Maturity. *2008 3rd International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICTTA.2008.4529948>
- Shajari, M., & Zuraini Ismail. (2010). Notice of Retraction: A comprehensive adoption model of e-Government services in developing countries. *2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science(ICAMS 2010)*, 548–553. <https://doi.org/10.1109/ICAMS.2010.5552982>
- Sharifi, H., & Zarei, B. (2004). An adaptive approach for implementing e-government in I.R. Iran. *Journal of Government Information*, 30(5–6), 600–619. <https://doi.org/10.1016/j.jgi.2004.10.005>
- Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Fokusmedia.
- Shrivastava, D. R. K., Raizada, D. A. K., & Saxena, M. N. (2014). Role of e-Governance to strengthen higher education system in India. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 4(2), 57–62. <https://doi.org/10.9790/7388-04215762>
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO'S pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.

- Sivarajah, U., Irani, Z., & Weerakkody, V. (2015). Evaluating the use and impact of Web 2.0 technologies in local government. *Government Information Quarterly*, 32(4), 473–487. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.004>
- Smircich, L., & Stubbart, C. (1985). Strategic Management in an Enacted World. *The Academy of Management Review*, 10(4).
- Snow, N., & Taylor, P. M. (2008). Routledge Handbook of Public Diplomacy. In *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203891520>
- Sodhi, I. S. (2015). E-Government in Central Africa. In *Emerging Issues and Prospects in African E-Government* (pp. 280–290). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6296-4.ch018>
- Song, C. (2010). Validating IS Success Factors: An Empirical Study on Webbased State or Local E-government Systems. *Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems*, 1–11.
- Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. *Management Decision*, 39(7), 551–556. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000005801>
- Straub, E. T. (2009). Understanding Technology Adoption: Theory and Future Directions for Informal Learning. *Review of Educational Research*, 79(2), 625–649. <https://doi.org/10.3102/0034654308325896>
- Sudrajat, A., Budiman, T., Haroen, R., & Yasin, V. (2021). Pendataan Aset Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.376>
- Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata*. Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2018). Metode Peneiltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Suhandono, E., & Hidayat, A. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan Milik Negara Di Pusat Penilaian Pendidikan. *Jurnal ASIIMETRIK: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.35814/asiimetrik.v2i1.1210>
- Sumaryanto, & Sumarna, S. (2022). Perancangan Aplikasi Inventaris Barang Milik Negara Berbasis Web Pada Deputy Bidang Pencegahan BNN. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, 4(2), 59–65. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v4i2.1552>
- Suprapti, E. (2018). Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) Studi Kasus di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/dr.v1i3.2850>
- Susanto, T. D., & Goodwin, R. (2011). An SMS-Based e-Government Model. In *Handbook of Research on E-Services in the Public Sector* (pp. 137–146). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-61520-789-3.ch012>

- Szmigielska-Rawska, K., Łukomska, J., & Tavares, A. F. (2018). Social Media Activity and Local Civic Engagement in Poland. *Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*, 279–287. <https://doi.org/10.1145/3209415.3209516>
- Tampubolon, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara di Universitas Negeri Medan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 3(1), 85–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234567/jma.v3i1.54>
- Tassabehji, R., Hackney, R., & Popovič, A. (2016). Emergent digital era governance: Enacting the role of the ‘institutional entrepreneur’ in transformational change. *Government Information Quarterly*, 33(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.003>
- Taylor, S., & Todd, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions. *International Journal of Research in Marketing*, 12(2), 137–155. [https://doi.org/10.1016/0167-8116\(94\)00019-K](https://doi.org/10.1016/0167-8116(94)00019-K)
- The Economist. (2008). *The Good, the Bad and the Inevitable: The Pros and Cons of E-Government* (2008 edn). The Economist Newspaper Limited.
- The World Bank Group. (2002). *The E-Government handbook for Developing Countries: A Project of InfoDev and the Center for Democracy and Technology*. The World Bank Group.
- THohari, A. H., Hidayat, F., Fani, M., & Nelmiawati, N. (2022). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis QR Code. *JURNAL INTEGRASI*, 14(1), 35–46. <https://doi.org/10.30871/ji.v14i1.3975>
- Thor, E., & Evtuhovici, R. (2003). Alternative dispute resolution and peace making for resolving agribusiness and food management conflict resolution in the Free Trade Area of the Americas grass roots initiatives with international applications. *International Food and Agribusiness Management Review*, 5(3).
- Tobin, A., & Smith, J. (2019). *Self-Sovereign Identity for Higher Education*. Evonym.
- Tolbert, C. J., Mossberger, K., & McNeal, R. (2008). Institutions, Policy Innovation, and E-Government in the American States. *Public Administration Review*, 68(3), 549–563. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00890.x>
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The process of technological innovation*. Lexington Books.
- Uddin, M. S., Haque, C. E., & Khan, M. N. (2020). Good governance and local level policy implementation for disaster-risk-reduction: actual, perceptual and contested perspectives in coastal communities in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 30(2), 94–111. <https://doi.org/10.1108/DPM-03-2020-0069>
- Vaidya, K. (2007). Applying the DeLone & McLean Information Systems Success Model to Measure Public e-Procurement Success. *COLLECTeR*, 9–11.
- van den Haak, M. J., de Jong, M. D. T., & Schellens, P. J. (2009). Evaluating

- municipal websites: A methodological comparison of three think-aloud variants. *Government Information Quarterly*, 26(1), 193–202. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.11.003>
- van Dijk, J. A. G. ., Peters, O., & Ebbers, W. (2008). Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands. *Government Information Quarterly*, 25(3), 379–399. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.09.006>
- van Velsen, L., van der Geest, T., ter Hedde, M., & Derks, W. (2009). Requirements Engineering for e-Government Services: A Citizen-Centric Approach and Case Study. *Government Information Quarterly*, 26(3), 477–486. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.02.007>
- Veiga, L., & Rohman, I. K. (2017). e-Government and the Shadow Economy: Evidence from Across the Globe. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 10428, pp. 105–116). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64677-0_9
- Veit, D. (2017). *Definition of E-Government*. Enzyklopaedie-Der Wirtschaftsinformatik.
- Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., & Ackerman, P. L. (2000). A Longitudinal Field Investigation of Gender Differences in Individual Technology Adoption Decision-Making Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 83(1), 33–60. <https://doi.org/10.1006/obhd.2000.2896>
- Venkatesh, V., Speier, C., & Morris, M. G. (2002). User Acceptance Enablers in Individual Decision Making About Technology: Toward an Integrated Model. *Decision Sciences*, 33(2), 297–316. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2002.tb01646.x>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y., Hu, P. J.-H., & Brown, S. A. (2011). Extending the two-stage information systems continuance model: incorporating UTAUT predictors and the role of context. *Information Systems Journal*, 21(6), 527–555. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2011.00373.x>
- Verdegem, P., & Verleye, G. (2009). User-Centered E-Government in Practice: A Comprehensive Model for Measuring User Satisfaction. *Government Information Quarterly*, 26(3), 487–497. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.03.005>
- Vicari, S. (1992). Risorse e funzionamento d'impresa. *Finanza, Marketing e Produzione*, 3.
- Von Bertalanffy, L. (1968). *General System theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.

- von der Heyde, M., Auth, G., Hartmann, A., & Erfurth, C. (2017). Hochschulentwicklung im Kontext der Digitalisierung - Bestandsaufnahme, Perspektiven, Thesen. In M. Eibl & M. Gaedke (Eds.), *Informatik Gesellschaft für Informatik (GI)* (pp. 1757–1772). International Federation for Information Processing.
- Walker, R. H., Craig-Lees, M., Hecker, R., & Francis, H. (2002). Technology-enabled service delivery. *International Journal of Service Industry Management*, *13*(1), 91–106. <https://doi.org/10.1108/09564230210421173>
- Wang, Y.-S., & Liao, Y.-W. (2008). Assessing eGovernment systems success: A validation of the DeLone and McLean model of information systems success. *Government Information Quarterly*, *25*(4), 717–733. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.06.002>
- Wang, Y.-S., & Shih, Y.-W. (2009). Why do people use information kiosks? A validation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. *Government Information Quarterly*, *26*(1), 158–165. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.07.001>
- Warkentin, M., Gefen, D., Pavlou, P. A., & Rose, G. M. (2002). Encouraging Citizen Adoption of e-Government by Building Trust. *Electronic Markets*, *12*(3), 157–162. <https://doi.org/10.1080/101967802320245929>
- Webster, J., & R.T, W. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, *26*(2), 13–23.
- Weerakkody, V., & Choudrie, J. Y. (2005). Exploring E-Government in the UK: Challenges, Issues and Complexities. *Journal of Information Science and Technology*, *2*(2), 25–45.
- Weinberg, G. M. (2001). *An Introduction to General Systems Thinking*. Dorset House Publishing Company.
- West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, *64*(1), 15–27.
- Wirananda, I. G. A. S. (2020). Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal IPTEKS Akuntansi Bagi Masyarakat*, *4*(2), 39–43.
- Wixom, B. H., & Todd, P. A. (2005). A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance. *Information Systems Research*, *16*(1), 85–102. <https://doi.org/10.1287/isre.1050.0042>
- Wootton, M., Macgowan, A. P., & Walsh, T. R. (2005). Expression of tcaA and mprF and glycopeptide resistance in clinical glycopeptide-intermediate Staphylococcus aureus (GISA) and heteroGISA strains. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, *1726*(3), 326–327. <https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2005.09.002>
- Wu, J., Ding, F., Xu, M., Mo, Z., & Jin, A. (2016). Investigating the Determinants of Decision-Making on Adoption of Public Cloud Computing in E-government. *Journal of Global Information Management*, *24*(3), 71–89. <https://doi.org/10.4018/JGIM.2016070104>

- Y., L. S., & G., G. E. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publication.
- Yanto, F., & Muammar, S. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi manajemen Danakuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Efektivitas Pengelolaan aset negara Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh Bireuen. *Jurnal Kebangsaan: Kajian Manajemen Dan Keuangan*, 10(19), 22–26.
- Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. *Government Information Quarterly*, 24(3), 646–665. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002>
- Yoon, J., & Chae, M. (2009). Varying criticality of key success factors of national e-Strategy along the status of economic development of nations. *Government Information Quarterly*, 26(1), 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.08.006>
- Yue, C. K. (2010). *Impacts of Technology Implementation on Individual Behaviors: Three Essays*. The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
- Yun, H. J., & Opheim, C. (2010). Building on Success: The Diffusion of E-Government in the American States. *Electronic Journal of E-Government*, 8(1), 71–82.
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1993). The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 21(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/0092070393211001>
- Zendrato, R. R., & Purnawan, M. E. (2012). *Manajemen Aset Tanah dan Bangunan Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2010*. Universitas Gajah Mada.
- Zhang, H., Xu, X., & Xiao, J. (2014). Diffusion of e-government: A literature review and directions for future directions. *Government Information Quarterly*, 31(4), 631–636. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.013>
- Zhang, P., Aikman, S. N., & Sun, H. (2008). Two Types of Attitudes in ICT Acceptance and Use. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(7), 628–648. <https://doi.org/10.1080/10447310802335482>
- Zhao, F., & Khan, M. S. (2013). An Empirical Study of E-Government Service Adoption: Culture and Behavioral Intention. *International Journal of Public Administration*, 36(10), 710–722. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.791314>
- Zheng, D., Chen, J., Huang, L., & Zhang, C. (2013). E-government adoption in public administration organizations: integrating institutional theory perspective and resource-based view. *European Journal of Information Systems*, 22(2), 221–234. <https://doi.org/10.1057/ejis.2012.28>
- Zmud, R. W. (1979). Individual Differences and MIS Success: A Review of the Empirical Literature. *Management Science*, 25(10), 966–979. <https://doi.org/10.1287/mnsc.25.10.966>